

Involution of Community Empowerment in Strengthening the Household Economy of Homeless and Beggars in Topeng Village, Malang City

Anggraito Wisnu Aji¹, Rachmad Kristiono Dwi Susilo^{2*}, Frida Kusumastuti³

^{1,2,3} Program Studi Magister Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang,
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia

Email : rachmad@umm.ac.id*

Abstract

One of the problems in Malang City is that there are still marginalized groups such as homeless people and beggars. Through the Desaku Menanti program initiated by the Ministry of Social Affairs and managed by the Malang City P3AP2KB Social Service, they are placed in Kampung Topeng to be empowered. This coaching has been going on for 4 years (starting from 2016 to 2020). However, in 2019 this area had no productive activities or an involution process occurred. This research uses a qualitative approach with ethnography. With the AGIL scheme (Adaptation, Goal-attainment, Integration, Latency) which is part of Talcott Parsons' Functional Structural Theory, this research produced several findings. Based on data collection about homeless people and beggars in Kampung Topeng. The findings of this study state that the form of empowerment involution is in the form of program unsustainability. The factors causing involution come from program implementation and target beneficiaries. From the program implementer's side, it is closely related to changes in the priority scale of the agency's program, changes in the head of the agency, limited resources, deterioration of collaboration, the issue of location far from the city center. Meanwhile, from the community side, the culture of poverty and non-standardized quality.

Keywords: *Involution; Community Empowerment; Homeless and Beggars; Topeng Village; Functional Structural*

Involusi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Gelandangan dan Pengemis di Kampung Topeng, Kota Malang

Abstrak

Salah satu permasalahan di Kota Malang adalah masih terdapat kelompok marginal seperti gelandangan dan pengemis. Melalui program Desaku Menanti yang digagas oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang mereka ditempatkan di Kampung Topeng untuk diberdayakan. Pembinaan ini sudah berlangsung selama 4 tahun (mulai dari tahun 2016 sampai 2020). Namun pada 2019 kawasan ini tidak ada aktivitas yang produktif atau terjadi proses involusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi. Dengan skema AGIL (Adaptation, Goal-attainment, Integration, Latency) yang merupakan bagian dari Teori Struktural Fungsional milik Talcott Parsons penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Berdasarkan pengumpulan data mengenai gelandangan dan pengemis yang ada di Kampung Topeng. Temuan-temuan penelitian ini menyatakan bentuk involusi pemberdayaan berupa ketidakberlanjutan program. Faktor-faktor penyebab involusi berasal dari pelaksanaan program dan warga binaan sasaran. Dari sisi pelaksana program terkait erat dengan perubahan skala prioritas program dinas, pergantian kepala dinas, keterbatasan sumber daya, kemerosotan kolaborasi persoalan lokasi yang jauh dari pusat kota. Sedangkan dari sisi masyarakat kebudayaan kemiskinan dan kualitas tidak terstandar.

Kata kunci: Involusi; Pemberdayaan Masyarakat; Gelandangan dan Pengemis; Kampung Topeng; Struktural Fungsional

LATAR BELAKANG

Permasalahan masyarakat marginal di perkotaan merupakan permasalahan yang cukup memprihatinkan. Masyarakat yang terpinggirkan atau masyarakat marginal kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan, rumah yang layak, dan perekonomian yang kurang layak. Diantara jenis dari masyarakat marginal yakni gelandangan dan pengemis. Pada umumnya mereka tidak memiliki keterampilan dan keahlian tertentu. Melalui Kampung Topeng yang digagas oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Dinas Sosial Kota Malang mereka diberdayakan agar mandiri. Kampung Topeng yang berlokasi di Desa Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ini menyajikan topeng besar yang memiliki tinggi 7,5 meter dengan lebar 5 meter yang menjadi icon utamanya. Program Desaku Menanti di Kota Malang menjadi alternatif memberdayakan masyarakat marginal seperti eks gelandangan dan pengemis. Melalui program ini masyarakat marginal yang tinggal di Kampung Topeng mendapatkan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan untuk menunjang aktivitas wisata di Kampung Topeng, seperti dilatih untuk memasak kue, membuat bakso, dan pelatihan lainnya agar bisa dijual di Kampung Topeng.

Kondisi wisata Kampung Topeng sejak peresmian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung ramai dikunjungi oleh wisatawan, mulai dari wisatawan lokal sampai dengan wisatawan mancanegara, pengelolaan Kampung Topeng pada tahun 2019 mengalami stagnasi, jumlah pengunjung menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung tahun 2017. Riset ini difokuskan pada Involusi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Gelandangan dan Pengemis Kampung Topeng.

Meminjam terminologi yang dinyatakan oleh Clifford Geertz, involusi merupakan pola kebudayaan yang sudah mencapai bentuk pasti tidak berhasil bertahan atau mengubahnya menjadi pola baru, tetapi terus berkembang menjadi sesuatu yang rumit. Secara empiris, involusi menunjuk Kerumitan pola dasar, penggarapan intern yang terlalu teliti, Kerumitan teknis dan keahlian teknis yang tidak ada habisnya, Hak milik makin ruwet, sewa menyewa makin rumit dan penyelesaian persoalan melalui sistem gotong royong (Geertz, 2016). Dengan mengadaptasi, konsep involusi pada kehidupan sosial, Geertz memiliki definisi umum, yakni terdapat kemerosotan tentang kondisi tertentu, hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhtalim yakni involusi terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah (Muhtalim, 2020). Involusi dalam literatur yang lain merujuk kemunduran yang terjadi dalam berkehidupan sosial yang ada di masyarakat akibat dari kebijakan (Wijaya & Syafhendry, 2023).

Diantara penyebab involusi yaitu relasi kekuasaan dan inovasi akar rumput menyediakan pengetahuan mendalam tentang agensi manusia yang terlibat dalam inovasi. Kemampuan strategis akar rumput melalui menyelaraskan kepentingan, memobilisasi sumber daya dan memengaruhi transisi keberlanjutan (Raj et al., 2022). Konteks penyebab involusi apabila dikaitkan dengan pemberdayaan yakni ketidakberlanjutan pemberdayaan ini bukan hanya ditentukan oleh individu, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sekitar setiap individu yang diberdayakan (Galie & Farnworth, 2019).

Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan daya kepada masyarakat-masyarakat yang termarginalkan, dalam hal ini intervensi diberikan berupa pelatihan keterampilan dan pendampingan agar dapat berdaya secara mandiri, pemberdayaan dilakukan terhadap orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang lemah dan tidak mendapatkan kemudahan untuk mengakses pendidikan, ekonomi, dan akses lainnya seperti orang pada umumnya (Scheyvens, 2020). Pemberdayaan masyarakat ini mengelompokkan kondisi yang spesifik berdasarkan keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi kelembagaan, serta potensi sarana dan prasarana yaitu sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah atau daerah (Habib, 2021).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat merupakan proses dalam pembangunan dimana masyarakat memiliki inisiatif untuk meningkatkan potensi dan kemampuan agar mampu memaksimalkan harkat, martabat dan jati diri mereka (Atmojo & Darumurti, 2021; Firman, 2021; Kaltsum et al., 2023; Lee & Jan, 2019; Rahayu & Febrina, 2021; Saleh & Sihite, 2020; Sofia, 2021; Suminartini & Susilawati, 2020; Susilo, 2017; Yusnandar et al., 2019). Pengawasan kebijakan lebih dominan dari pada efektivitas pemberdayaan. Struktur demokratik mendukung terutama yang fokus kepada pemberdayaan komunitas dan dukungan pemerintah lokal untuk memahami dan menanggapi pemberdayaan (Lawson & Kearns, 2014). Pemberdayaan perempuan yang ada di Bahrain salah satunya dilakukan untuk mendorong perempuan agar menjadi pengusaha atau wirausaha, terdapat tiga faktor penting dalam pemberdayaan perempuan di Bahrain, yaitu kualitas pendidikan, sosial budaya, dan kebijakan (Alsaad et al., 2023).

Penguatan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian agar masyarakat dapat merasakan kemandirian ekonomi dan masyarakat lebih berdaya (Cahyono et al., 2023) Penguatan ekonomi ini dilakukan agar masyarakat lebih mandiri

dan merasakan perekonomian yang stabil yang bukan hanya dirasakan oleh masyarakat atas, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah (Amalta et al., 2023).

Tidak mudah untuk melaksanakan pemberdayaan secara berkelanjutan. persoalan involusi yakni dikotomi atau sinergi, inkonsistensi, perubahan kemasan dan sarana legitimasi kepentingan (Soetomo, 2018). Selain itu involusi ini juga disebabkan oleh faktor internal dari diri sendiri, hal ini yang dikemukakan oleh Oscar Lewis bahwa seseorang tersebut tetap menjadi miskin dikarenakan memiliki sifat malas, kurang atau bahkan tidak memiliki etos kerja, istilah ini dikenal dengan kemiskinan kultural (*cultural poverty*) (Suharto, 2014). Involusi pemberdayaan ini disebabkan oleh kemauan setengah dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat (Sutaryono, 2019).

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar mengungkap dan menggali data-data mengenai involusi pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Kampung Topeng. Analisa involusi ini sangat penting sebagai masukan perbaikan rata-rata persoalan pemberdayaan di Indonesia. Selain itu, selama ini studi-studi pemberdayaan masyarakat masih banyak meneliti tentang implementasi pemberdayaan masyarakat, studi tentang ketidakberlanjutan pemberdayaan sangat jarang dibahas oleh peneliti. Studi dalam penelitian ini membahas tentang ketidakberlanjutan atau involusi pemberdayaan masyarakat, pembahasan dalam studi ini yakni tentang bentuk involusi pemberdayaan masyarakat dan faktor penyebab involusi di Kampung Topeng.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan kenyataan atau fakta alamiah, hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa yang ada di lapangan (Ikbar, 2014). Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada interaksi antara sumber data dengan peneliti yang memiliki latar belakang, pandangan, persepsi, dan keyakinan yang berbeda-beda (Sugiyono, 2020). Adapun jenis penelitian ini yakni etnografi, yakni dalam hal ini posisi peneliti sebagai pelajar, sedangkan posisi masyarakat yang diteliti menjadi gurunya (Koeswinarno, 2015). Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini yakni *purposive*, pemilihan subjek dalam *purposive* didasarkan pada pertimbangan agar sesuai dengan kebutuhan peneliti (Sugiyono, 2020).

Subjek dalam penelitian ini yaitu: 1) Koordinator Kampung Topeng, Kota Malang dan 2) Penghuni Kampung Topeng, Kota Malang. Sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu: 1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial 2) Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Disabilitas dan Tuna Sosial 3) Pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial “Insan Sejahtera” 4) Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial “Insan Sejahtera” 5) Pekerja Sosial Masyarakat Kota Malang 6) Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kampung Topeng, Kota Malang, dan 7) Rukun Warga (RW) 007.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Observasi merupakan proses penggalian informasi atau data secara langsung (Sidiq et al., 2019). Sedangkan wawancara merupakan tahapan dalam penggalian data yang berasal dari subjek yang diwawancarai (Sugiyono, 2020). Kemudian untuk dokumentasi merupakan penggalian data berdasarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Djam'an & Komariah, 2013). Selanjutnya, *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu salah satu tahapan penggalian data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan banyak orang yang membahas topik penelitian (Sugarda, 2020). Adapun teknik analisa data yang

dikemukakan oleh Spradley yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemberdayaan di Kampung Topeng

Kampung Topeng merupakan tempat yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Malang dengan tujuan untuk memberdayakan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Malang. Awalnya sebelum menjadi Kampung Topeng, tempat ini merupakan hutan bambu yang merupakan aset pemerintah kota, kemudian walikota mengubahnya menjadi tempat tinggal gelandangan dan pengemis. Sementara itu, Kampung Topeng ini sendiri merupakan program Desaku Menanti yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dikelola oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Berdasarkan program Direktorat Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang, Kementerian Sosial yaitu program Desaku Menanti tersebut dibuat dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan yang dalam hal ini salah satunya di Kota Malang, program ini digagas untuk menangani gelandangan dan pengemis dengan mengedepankan rehabilitasi sosial yang ditujukan pada eks gelandangan dan pengemis secara terpadu dengan berbasiskan desa.

Sebenarnya program ini berbasis wilayah desa, tetapi karena keberhasilan lobi kepala Dinas Sosial waktu itu, pemerintah kota berhasil memperoleh program ini. Akhirnya, Kampung Topeng diresmikan oleh Wali Kota Malang, Mochamad Anton atau yang dikenal dengan Abah Anton 14 Februari 2017. Awalnya masyarakat Kampung Topeng masih adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu masyarakat Kampung Topeng menyampaikan bahwa tujuan penempatan di Kampung Topeng agar mereka tidak lagi turun ke jalan. Hal ini yang disampaikan oleh Deo Rindi Pratama dan Pak Heri Rusdianto

“Pertama kali enggak Mas, dulu sering pulang..., masih belum akrab sama tetangga..., pertama saya sering pulang, sering turun, sering turun (Sukun), tapi orang tua ngomong suruh di sini ae, kan pertama masih malu-malu jarang keluar sampe dua minggu nggak pernah keluar” (Wawancara dilakukan pada 12 Agustus 2023)

“Pada awalnya itu, tujuan kita ditempatkan di sini agar tidak turun lagi ke jalanan, bisa mendapatkan penghasilan bukan dari hasil turun ke jalan Mas.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

Pada awal beroperasinya Kampung Topeng, kondisi warga antara satu dengan yang lain masih renggang, ada tetangga yang tidak mau membayar ketika membeli makanan, hal ini yang disampaikan oleh Ibu Anas Suprihatin.

“Dulu itu saya jualan Mas, jualan sayur. Tapi ya selama jualan itu ada tetangga yang suka beli sayur bayarnya nanti, tapi ujung-ujungnya nggak dibayar, tapi ya orang itu emang agak bermasalah dengan warga lain di Kampung Topeng.” (Wawancara dilakukan pada 1 Agustus 2023)

Program Desaku Menanti di Kampung Topeng ini Hal ini agar mereka tidak kembali lagi untuk turun ke jalan seperti mengamen dan mengemis. Hal ini yang disampaikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kampung Topeng, Yuliatiningtyas.

“Awal berdirinya Kampung Topeng dari Dinas Sosial bilang Mas ke warga di Kampung Topeng agar nggak turun ke jalan, kalo sekarang, ya sudah mulai turun ke jalan lagi Mas.” (Wawancara dilakukan pada 24 Agustus 2023)

Proses Pemilihan Gelandangan dan Pengemis yang Ditempatkan di Kampung Topeng

1. Pendataan

Dalam rangka pemilihan masyarakat eks gelandangan dan pengemis yang akan tinggal di Desaku Menanti atau yang dikenal dengan Kampung Topeng. Mereka eks-gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki rumah tetap akan ditawarkan untuk tinggal di Kampung Topeng, hal ini yang disampaikan oleh Koordinator Kampung Topeng, Ibu Siti Ningsih.

“Kan dulu kerja di jalan a mas, trus apa sering kena razia itu lho, mungkin itu data kan udah masuk ke sana ke Dinsos...., cuman waktu itu anak kecil-kecil saya ikutan ke jalan, sering kena razia mungkin itu datanya dari sana juga...., Ya mau tak kasih rumah, intinya tuh sampe besok anak cucu, hak pake nggak boleh dijual.” (Wawancara dilakukan pada 31 Agustus 2023)

Koordinator Kampung Topeng tersebut mengatakan bahwa sebelum menempati Kampung Topeng, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Malang, ketentuan dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, mau memberikan hunian rumah untuk tempat tinggal dengan syarat rumah tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual. Selain itu Dr. Sri Wahyuningtyas, M.Si selaku eks Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menyampaikan tentang penjarangan gelandangan dan pengemis di Kota Malang yang akan ditempatkan di Kampung Topeng.

“Kita razia, kita razia tahun 2015. Itu kita razia di Kota Malang, saya dapat 80 gelandangan dan pengemis, kemudian dari 80 itu memang waktu saya razia ada yang dapat 80 (ribu), 150 (ribu)...., saya tanya satu-satu di Aula. Sampean seneng entuk duit teko wong-wong ngono iku a...., berarti anak-anak sampean nanti akan menjadi pengemis kaya sampean, tidakkan kalian kepingin anak-anak kalian sukses?” (Wawancara dilakukan pada 2 September 2023)

Eks Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang tersebut mengatakan bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Malang sekaligus melakukan pendataan terhadap mereka untuk diarahkan agar tidak turun lagi ke jalan untuk mengamen dan

mengemis dan digantikan dengan jaminan hidup sebesar Rp 20.000/orang yang ada di Kartu Keluarga (KK) penduduk Kampung Topeng, hal ini menjadi siasat agar mereka tidak lagi turun ke jalan.

2. Modal

Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang memberikan bantuan modal kepada penduduk Kampung Topeng sebesar Rp 5.000.000 yang ditujukan kepada setiap keluarga. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh koordinator Kampung Topeng, Ibu Siti Ningsih.

“Dapat uang modal 5jt, uang jadupnya 9jt per tiga bulan dikasih 3jt. Kalo yang jadup itu variasi sih Mas, kalo yang banyak anggotanya 100rb/hari. Kalo orang 2 ya 50rb. Jadup itu jaminan hidup, selama kita pindah ke sana. Kan kita diajak ke sana dengan syarat jangan turun lagi ke jalan. Jadi di sana dikasih apa jaminan hidup dulu selama 9 bulan, biar nggak ke jalan lagi..., kalo yang 5jt itu dikasih pas kita udah pindah ke sana. Kan tujuannya buat kita usaha di sana...,dapet sembako, kayak beras, minyak, gula gitu wes. Sampe berapa tahun, dua tahun.” (Wawancara dilakukan pada 31 Agustus 2023)

Eks Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Dr. Sri Wahyuningtyas, M.Si menyampaikan Kementerian Sosial memberikan modal sebesar Rp 5.000.000 kepada setiap keluarga untuk modal usaha sesuai dengan yang ingin mereka lakukan.

“Nanti kan Kementerian Sosial memberikan modal 5.000.000..., diberikan uang selama mereka nggak ngemis diberikan oleh Kementerian Sosial, satu jiwa 20.000, selama 5 bulan, jadi kalo anaknya 3 dan ditambah Bapak Ibu, berarti 100 (ribu), waktu itu..., oleh Bu Menteri orang-orang diberikan modal uang Rp 5.000.000 supaya kamu usaha, sebagaimana kamu pengen otomotif, kalo bengkel ya buka bengkel, kalo jait ya buka jait.” (Wawancara dilakukan pada 2 September 2023).

3. Pelatihan

Sebelum masyarakat Kampung Topeng menempati Kampung Topeng, mereka diberikan pelatihan terlebih dahulu selama 3 bulan. Pelatihan ini berupa pelatihan membuat makanan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Ningsih selaku Koordinator Kampung Topeng.

“Semua, kan warga Sukun sama Muharto, ada yang Gadang, ada yang Mergosono. Semua pelatihan Mas, semua yang ikut 40 orang..., tiga bulan sebelumnya kayaknya pelatihan-pelatihan.” (Wawancara dilakukan pada 31 Agustus 2023)

Selain itu Koordinator Kampung Topeng tersebut banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan sebelum menempati Kampung Topeng. Pelatihan tersebut diantaranya yaitu membuat rengginang, peyek, telur asin, tahu sutra,

susu kedelai, minuman jahe, semokan, anyaman, sulaman yang berbentuk boneka.

“Ada bikin rengginang, ada bikin peyek, ada bikin telur asin, tahu sutra, bikin susu kedelai, bikin semokan, anyaman, sulaman kaya bikin boneka atau apa. Sebelum pindah itu, sembarang pokok e, terus bikin topeng, bikin minuman jahe.” (Wawancara dilakukan pada 31 Agustus 2023)

Selain Koordinator Kampung Topeng, eks Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang mengatakan bahwa masyarakat yang telah didata ini diberikan pelatihan.

“...Trus dilatih sesuai dengan bakat mereka, digembleng di Pasuruan sampe 2 bulan. Ada yang lepas, ada yang bertahan, lika-likunya di situ. Dikantina, dilihat karakternya, dilihat kemauannya mau apa enggak..., kita kerjasama dengan pemerintah Provinsi, dengan pemerintah Dinas Sosial dengan Pemerintah Kota Malang, tiga pemerintah waktu itu.” (Wawancara dilakukan pada 2 September 2023)

Sebelum Masyarakat Kampung Topeng menempati hunian di Desaku Menanti, mereka diberikan pelatihan terlebih dahulu di Pasuruan, pelatihan ini sekaligus melihat karakter dan komitmen dari mereka ada keinginan untuk berubah atau tidak, pelatihan ini melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang.

4. Pembangunan Hunian

Dr. Sri Wahyuningtyas, M.Si selaku eks Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang mengatakan pembangunan hunian bagi mereka waktu itu dilakukan bersama-sama dengan mereka (eks gelandangan dan pengemis) yang akan menempati hunian Kampung Topeng ini.

“Pembangunan ini dilakukan bersama dengan mereka (eks gelandangan dan pengemis), Pak RW, dan pihak lainnya. Jadi jalannya itu saya kerjasama dengan PU Kota Malang, kemudian apa namanya juga bersama dengan Pertanian, Lingkungan Hidup, saya minta melalui Surat Tugas., dan juga saya pengambil kebijakan saya membuat tanaman yang bagus, saya lakukan itu waktu itu.” (Wawancara dilakukan pada 2 September 2023)

5. Penempatan

Koordinator Kampung Topeng, Ibu Siti Ningsih menyampaikan bahwa menduduki Kampung Topeng itu sejak 11 November tahun 2016 bersama dengan penduduk yang lainnya.

“Pindah itu 11 November 2016.” (Wawancara dilakukan pada 31 Agustus 2023)

Kelengkapan Sarana Pemberdayaan

Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang memberikan sarana dalam rangka pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada di Kampung Topeng. Beberapa diantaranya seperti gazebo yang digunakan untuk jualan, bengkel kerja yang digunakan untuk memasak peyek, membuat telur asin, membuat tahu sutra. Selain itu ada galeri topeng, gazebo, wahana.

1. Gazebo (Stand untuk jualan)

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kampung Topeng, Yuliatiningtyas menyampaikan bahwa terdapat gazebo yang digunakan masyarakat Kampung Topeng untuk berjualan makanan.

“Itu dulu gazebo untuk jualan, dulu di situ jualannya.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

2. Bengkel kerja

Tenaga Kesejahteraan Sosial menyampaikan di Kampung Topeng, Ibu Yuliatiningtyas terdapat bengkel kerja yang digunakan untuk pelatihan pembuatan makanan, diantaranya seperti keripik singkong, keripik talas, keripik pisang.

“Dulu (mereka) dipekerjakan di bengkel kerja itu, itu yang dikotak-kotak itu tempat kompor, ada bekas besi-besi itu dulu mesin giling untuk potong keripik, mesin giling kacang, ada semua mas, mesin giling daging, ada...., ini sudah rusak ini..., kalo dulu lengkap Mas, besi-besi ini ada mesin potong apa, untuk keripik singkong, keripik talas, keripik pisang ada, ini ada wajan besar, packing di sini, ini ada etalase dua.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

3. Galeri Topeng

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kampung Topeng, Ibu Yuliatiningtyas menyampaikan terdapat galeri topeng sebagai salah satu sarana di Kampung Topeng untuk memperlihatkan topeng-topeng yang ada di Kampung Topeng.

“Itu galeri topeng, Itu dulu topengnya. Jadi dari kantor dibawa ke bawah situ dipajang, ada etalasenya juga..., habis selesai sore gitu kita masukkan lagi ke sekretariat.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

4. Gazebo

Sarana pemberdayaan lain, yaitu Gazebo. Hal ini yang disampaikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial, Yuliatiningtyas.

“Dulu kan juga ini Mas, di atas wahana itu gazebo itu ada empat buah.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

5. Wahana

Beberapa wahana yang tersedia di Kampung Topeng, yaitu *outbond*, *flying fox* dan tempat bermain untuk anak-anak

a. *Outbond*

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kampung Topeng, Ibu Aminatus Zuhriyah, S.Psi menyampaikan terdapat *outbond*, letaknya di bagian atas Kampung Topeng.

“Dulu itu ya ada outbond juga Mas, dan ramai anak-anak main outbond di sana.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

b. *Flying fox*

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kampung Topeng, Ibu Yuliatiningtyas menyampaikan di bagian atas Kampung Topeng, dahulunya terdapat wahana *flying fox* untuk pengunjung Kampung Topeng.

“Di atas, di pohon besar atas, ada bekas tangganya.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

c. Wahana bermain

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kampung Topeng, Ibu Yuliatiningtyas menyampaikan ada wahana bermain lainnya seperti ayunan, perosotan, dan wahana bermain lainnya untuk anak-anak

“Di bagian atas itu ada wahana bermain juga Mas, kaya perosoyan, ayunan dan wahana-wahana lain untuk anak-anak yang berkunjung ke sini.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

6. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan ini sudah tidak ada lagi sejak 2021 sampai dengan saat ini, hal ini yang disampaikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kampung Topeng, Ibu Yuliatiningtyas bahwa saat ini pelatihan keterampilan kepada masyarakat Kampung Topeng sudah tidak ada lagi.

“Pelatihan sudah nggak ada lagi Mas, terakhir itu dari Balai Pelatihan yang dari Yogyakarta pada tahun 2020, kalo dari tahun 2021 sampai 2023 sudah nggak ada lagi Mas.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

7. Penjualan

Penjualan makanan yang dilakukan oleh penduduk Kampung Topeng sudah tidak senyaman dulu, dikarenakan sejak pandemi sampai saat ini. Walaupun terdapat pengunjung yang ke Kampung Topeng, akan tetapi intensitasnya menurun dan pengunjung belum tentu beli makanan yang ada di Kampung Topeng. Hal ini disampaikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kampung Topeng, Yuliatiningtyas.

“Dulu jualan itu di gazebo..., mereka di gazebo itu jualan makanan untuk pengunjung Kampung Topeng.” (Wawancara dilakukan pada 12 Agustus 2023)

8. Pemasaran

Pemasaran dari hasil kerajinan tangan seperti topeng dan anyaman yang dibuat oleh masyarakat Kampung Topeng tidak lagi dipasarkan seperti pada awal terbentuknya Kampung Topeng. Hal ini yang disampaikan oleh eks Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Dr. Sri Wahyuningtyas, M.Si

“Dulu itu saya bantu pasarkan ke orang-orang Dinas lainnya untuk beli, termasuk UMM itu juga dulu saya minta beli.” (Wawancara dilakukan pada 2 September 2023).

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Malang juga menyampaikan bahwa saat Kampung Topeng masih aktif beroperasi, makanan-makanan yang dibuat oleh masyarakat Kampung Topeng akan dijual ke pihak luar seperti kampus, dinas-dinas selain Dinas Sosial

“Ya dulu itu makanan yang dibuat itu dibantu Bu Yuyun untuk menjual ke sekolah-sekolah, ke Dinas selain Dinas Sosial.” (Wawancara dilakukan pada 3 September 2023)

Ketidakberlanjutan Program sebagai Bentuk Involusi Pemberdayaan Masyarakat

Ketidakberlanjutan program bisa dilihat dari temukannya fenomena di lapang, sebagai berikut:

1. Berhentinya aktivitas penggunaan Gazebo (*Stand* untuk Jualan)

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kampung Topeng menyampaikan bahwa terdapat gazebo yang digunakan masyarakat Kampung Topeng untuk berjualan makanan.

“Itu dulu gazebo untuk jualan, dulu di situ jualannya, Dulu gazebonya kan dari bambu, akhirnya pandemi gazebonya rusak karena kita terbatas biaya kalo mau beli bambu lagi kan mahal, akhirnya diganti heeh, ini baru kemarin 2022 ya bu ya dibetulkan, soalnya yang bambu itu rusak semuanya...,Sekarang yang jualan bisa dihitung jari Mas, tidak banyak karena sejak pandemi itu pengunjung mulai sepi, ditambah lagi sekarang wahana kampung topeng banyak yang rusak, itu mungkin yang jadinya membuat jumlah pengunjung tidak sebanyak awal pembukaan kampung topeng.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

Bentuk konsekuensinya dari berhentinya aktivitas penggunaan gazebo yang digunakan untuk jualan ini yakni masyarakat kampung topeng tidak memiliki tempat khusus untuk jualan lagi, sehingga hampir sebagian masyarakat Kampung Topeng kembali lagi ke jalanan.

2. Berhentinya Pelatihan dan Aktivitas Memasak Makanan dan Membuat Topeng

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pemberian berbagai pelatihan kepada warga, seperti pelatihan membuat makanan, peyek, membuat topeng. Warga sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Pemerintah juga sudah membantu dalam hal pemasaran seperti pihak dinas sosial dan kampus mitra

telah membeli produk warga sehingga pendapatan warga meningkat, tetapi karena dinas sosial tidak lagi menjadikan kampung ini sebagai program unggulan, maka pelatihan terhenti. Konsekuensi dari berhentinya pelatihan maka tidak ada lagi aktivitas produktif untuk memasak atau dengan kata lain, produk-produk makanan yang dihasilkan. Hanya masih ada beberapa berjualan di rumah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kampung Topeng Ibu Yuliatiningtyas, Koordinator Kampung Topeng, Ibu Siti Ningsih dan Bapak Andik.

“Dinas Sosial itu dulu pemberdayaannya dengan cara ngasih pelatihan untuk membuat peyek, membuat topeng, membuat bakso, banyak Mas..., tapi pada tahun 2018 akhir sudah mulai ada masyarakat Kampung Topeng yang turun ke jalan lagi.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

“Pembuatan makanan yang dijual gitu, sekarang-sekarang sudah nggak ada mas.” (Wawancara dilakukan pada 31 Agustus 2023)

“Kalo sekarang ya kami sudah buat topeng lagi.” (Wawancara dilakukan pada 1 September 2023)

3. Tidak Adanya Pendampingan Sosial di Lapang

Sebenarnya banyak pihak yang melakukan pendampingan baik dari dinas sosial maupun dari kampus-kampus mitra, tetapi sejak kepala dinas sosial diganti program ini tidak berkelanjutan yang akhirnya pendampingan sosial terbengkelai. Konsekuensinya, pola pembinaan yang diberikan kepada warga berhenti. Akhirnya, target perubahan mindset tidak tercapai. Pengelola menyadari bahwa target pemberian ketrampilan belum selesai, seperti pembuatan topeng masih belum profesional, tetapi pendampingan sosial yang tidak dilanjutkan menjadi semakin memperburuk situasi ini.

“2020, paling itu Cuma dua. Pas aku Dinas itu banyak (yang mendampingi).” (Wawancara dilakukan pada 2 September 2023).

4. Tidak Ada Penganggaran APBD untuk Kampung Topeng

Salah satu komitmen dari pemerintah kota yaitu memberikan anggaran (budget) untuk pengelolaan kampung. Namun, pada saat pemerintah menghadapi pandemi, penganggaran tersebut dihentikan. Selain itu, setelah pandemi berlalu, dinas sosial mengalihkan untuk program-program lain disebabkan banyak masalah sosial di Kota Malang yang belum tertangani. Konsekuensinya, semua aktivitas di Kampung Topeng otomatis terhenti.

Kepala Bidang menyatakan bahwa pendampingan sudah selesai, perkembangan berikutnya warga harus mandiri. Berangkat dari hal ini, tidak ada lagi penganggaran. Tidak terurusnya destinasi wisata kampung topeng menyebabkan destinasi wisata rusak. Terdapat gazebo untuk sarana untuk pengunjung duduk-duduk dan bersantai di dekat wahana-wahana bermain anak, saat ini gazebo tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi karena kondisinya yang sudah rusak. Hal ini yang disampaikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kampung Topeng, Ibu Yulianingtyas.

“Dulu kan juga ini Mas di atas wahana itu ada gazebo itu ada empat..., itu rusak semua..., ya yang di tempat bermain.” (Wawancara dilakukan pada 15 Agustus 2023)

Dr. Sri Wahyuningtyas, M.Si eks Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menyampaikan bahwa penganggaran hanya berasal dari Yayasan, karena dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah tidak bisa lagi untuk diakomodasikan ke Kampung Topeng.

“Kalo bantuan APBD sudah gak bisa.” (Wawancara dilakukan pada 2 September 2023)

Pengunjung yang ke Kampung Topeng jumlahnya tidak sebanyak saat tahun awal dibukanya Kampung Topeng, yakni tahun 2017 sehingga tidak ada pemasukan dari uang parkir pengunjung untuk warga.

5. Tidak Ada Pemasaran

Dr. Sri Wahyuningtyas, M.Si eks Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menyampaikan saat ini tidak ada lagi pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kampung Topeng.

“Selama ini kalo sudah membuat pesanan itu, harus ada yang bisa memasarkan. Kalo kita nunggu pesan, gak mungkin, karena teman-teman sekarang harus makan.., kemaren itu sebenarnya bisa dilanjutkan karena sudah ada sampe sekarang teman-teman di Pasca tanya, kok temen-temen Kampung Topeng gak ngirim peyek, padahal kita nunggu, lima puluh ribu itu enteng bagi Kepala Sekolah, jadi harus ada yang mengkoordinir.” (Focus Group Discussion pada 2 Oktober 2023).

Faktor Penyebab Involusi

Beberapa faktor penyebab involusi pemberdayaan masyarakat di Kampung Topeng dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Skala Prioritas Bidang yang Menangani Kampung Topeng Dinas

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, khususnya Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Disabilitas dan Tuna Sosial memiliki fokus program penanganan yang banyak, karena pada Sub-Substansi ini menangani disabilitas, gelandangan, pengemis, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang lainnya sebagaimana kutipan dengan subjek penelitian:

“di sie saya menangani disabilitas sama gelandangan pengemis dan PMKS lainnya di luar lansia dan anak, itu di sie saya, dibantu sama Mbak Itsmi ini peksosnya sama Mbak Monica, dan kami tidak punya tenaga admin jadi nyampur. Bahkan tugas sampingannya lebih banyak dibanding tugas utamanya.” (Wawancara dilakukan pada 1 September 2023)

Apabila pelaksanaan program hanya terfokus terhadap Desaku Menanti atau masyarakat yang tinggal di Kampung Topeng, hal itu akan dikhawatirkan berdampak pada penanganan program selain dari Kampung Topeng menjadi terbengkalai atau tidak tertangani dengan baik lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Ibu Dra. Titik Kristiani Tri R., M.T.

“Lha kalo terus-menerus kami hanya menangani satu, dua, tiga. Lho yang lain bagaimana? Jadi desaku menanti kasusnya seperti itu.” (Wawancara dilakukan pada 1 September 2023).

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menyampaikan banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selain Kampung Topeng yang harus ditangani oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

“Karena yang ditangani oleh Dinas Sosial tidak hanya panjenengan yang di Kampung Topeng, banyak sekali. PPKS yang memerlukan intervensi dari Pemerintah Kota Malang. Jadi kalo Dinas Sosial terus fokus untuk mendampingi Bapak-Ibu yang berada di Kampung Topeng, maka yang lainnya tidak terpegang, karena kami juga harus menghitung tenaga, biaya yang ada, dan jumlah PPKS yang harus ditangani.” (Focus Group Discussion pada 2 Oktober 2023)

2. Pergantian Kepala Dinas

Pergantian Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang pada akhir 2018 menjadi salah satu faktor involusi pemberdayaan masyarakat di Kampung Topeng, Kepala Dinas yang sebelumnya mendampingi berdirinya Kampung Topeng, pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan masyarakat Kampung Topeng hingga penjualan-penjualan makanan dan topeng yang diproduksi oleh masyarakat Kampung Topeng. Kepala Dinas Sosial membantu memasarkan atau penjualan ke kolega-kolega Kepala Dinas Sosial, seperti dinas-dinas yang ada di Kota Malang, termasuk ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

“ya, gak boleh. Ngapain sudah pensiun kok mending di rumah aja, lah kok turun mengurus Kampung Topeng..., kan sudah bagus mbok diteruske, ngko nek ono ide ada tambah o, ya tapi akhirnya itu kan ide Bu Yuyun bukan ide saya..., ndak mau meneruskan dari yang bertugas sebelumnya” (Wawancara dilakukan pada 2 September 2023)

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, Dra. Titik Kristiani Tri R., M.T menyampaikan pergantian Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang tentu akan berbeda juga kebijakan yang akan dibuat dan diimplementasikan.

*“Tetapi dengan bergantinya pimpinan, tentu ada perubahan kebijakan.”
(Focus Group Discussion pada 2 Oktober 2023)*

Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Disabilitas dan Tuna Sosial Heny Rachmaniar, S.P., MM. menyampaikan ada perubahan kebijakan dari Kepala Dinas Dra, Sri Wahyuningtyas, M.Si dengan Kepala Dinas yang selanjutnya Dra. Penny Indriani, MM.

“Ada banyak hal yang maju mundur mau kita laksanakan terkait juga ada perubahan kebijakan Ibu Kadin pasca Bu Yuyun sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas..., mungkin Bu Penny saat menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial mungkin mempunyai kebijakan tersendiri.” (Focus Group Discussion pada 2 Oktober 2023)

3. Keterbatasan Sumber Daya

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, khususnya Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Disabilitas dan Tuna Sosial menyampaikan bahwa sumber daya dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang terbatas, tentu perlu bantuan dari pihak eksternal dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

“Sumber daya kami terbatas, banyak yang ditangani, jadi sebenarnya perlu bantuan dari eksternal Dinas Sosial, dari kampus misalnya.” (Wawancara dilakukan pada 1 September 2023)

4. Menyusutnya Kolaborasi

Dr. Sri Wahyuningtyas, M.Si selaku Eks Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang mengatakan berdirinya desaku menanti Kampung Topeng ini juga menggandeng banyak pihak, berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

“Mundur semua....,Dulu kolaborasi dengan banyak pihak, kalo sekarang kan kerjasama dan kolaborasi tersebut tidak sebanyak dulu.” (Wawancara dilakukan pada 2 September 2023)

5. Lokasi Jauh dari Pusat Kota

Salah satu masyarakat Kampung Topeng, Pak Slamet menyampaikan salah satu kendala dari Kampung Topeng, yaitu jarak tempuh lokasi Kampung Topeng dari Pusat Kota Malang sangat jauh.

“Jauh Mas, jaraknya itu jauh, kan dulu itu kalo nggak salah Pak Lurahnya bandingkan Kampung Topeng dengan Kampung Warna-Warni di Brantas. Ya jelas, di situ orang semua tau, lewat pake mobil tau, kalo di Kampung Topeng sini siapa yang tau.” (Focus Group Discussion pada 2 Oktober 2023)

Penyebab lain dari involusi pemberdayaan masyarakat di Kampung Topeng dari sisi masyarakat, yaitu:

1. Budaya Kemiskinan

Terdapat masyarakat yang kecenderungan memiliki budaya kemiskinan karena kondisi keluarga yang belum mendukung untuk melakukan perubahan agar dapat hidup secara mandiri, selain itu kondisi lingkungan sekitar yang ada di Kampung Topeng juga menjadi salah satu faktor mereka belum dapat mandiri. *Mindset* yang mereka miliki belum sepenuhnya berubah.

“Ini sudah terminasi, ternyata kembali lagi ke awal lagi. Jadi keluarga tidak mendukung, lingkungan kurang mendukung.” (Wawancara dilakukan pada 1 September 2023)

Dr. Sri Wahyuningtyas, M.Si selaku eks Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menyampaikan untuk merubah mereka memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena mereka turun ke jalan bukan hanya satu tahun atau dua tahun, melainkan sudah bertahun-tahun.

“Bayar utang Bu, waktu itu saya nggak marah, saya hanya maklum mereka sudah 20 tahun ke jalan.” (Wawancara dilakukan pada 2 September 2023)

2. Kualitas tidak standar

Masyarakat Kampung Topeng memiliki pengrajin yang membuat topeng untuk dijual kepada pengunjung, namun yang menjadi salah satu kendala yakni kualitas dari topeng yang dibuat oleh pengrajin di Kampung Topeng ini belum memenuhi standar dan proses pembuatannya memerlukan waktu yang lama. Hal ini yang disampaikan oleh eks Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

“Sebetulnya itu, kan begini. Misalnya ada pesanan 100 atau 200 harus jadi dalam 3 hari atau hari-hari tertentu. Itu yang mereka (pengrajin di Kampung Topeng) belum bisa untuk memenuhi hal itu. Sehingga kami memesan dari pihak luar. Selain itu kualitas topeng juga masih belum sebagus pengrajin topeng yang pada umumnya punya pengalaman.” (Wawancara dilakukan pada 2 September 2023)

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menyampaikan kualitas standar belum standar, hal ini agar tidak mengecewakan pengunjung yang datang ke Kampung Topeng.

“Makanan juga seperti itu standar, misalnya rasanya seperti ini harganya begini, tetap harus seperti itu, jangan karena rame, berubah atau dikurangi kualitasnya.” (Focus Group Discussion dilakukan pada 2 Oktober 2023)

Analisis Involusi Pemberdayaan Masyarakat yang dialami oleh Gelandangan dan Pengemis di Kampung Topeng berdasarkan Skema AGIL

Terdapat salah satu teori dalam sosiologi, yakni Teori Fungsionalisme Struktural milik Parson dalam skema yang dikenal dengan AGIL. Parsons menjelaskan terdapat empat fungsional, yakni *Adaptation*, *Goal attainment*, *integration*, dan *Latency* (Turama, 2020).

Syarat pertama yakni *Adaptation*, yakni kemampuan dalam hal menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Berkenaan dengan *adaptation* ini,

gelandangan dan pengemis yang awalnya tidak mempunyai rumah tetap, Dinas Sosial P3AP2KB memberikan tempat singgah atau rumah di Kampung Topeng untuk ditempati secara gratis tanpa membayar uang sewa. Ketika ditempatkan di Kampung Topeng, gelandangan dan pengemis tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, karena yang sebelumnya ia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau menyewa rumah, akan tetapi mereka dapat tempat singgah tanpa harus memikirkan biaya sewa dari rumah yang disinggahinya. Selain itu, pada awal mereka menempati Kampung Topeng, terdapat serangkaian kegiatan pemberdayaan yang mereka terlibat di dalamnya, dalam hal ini mereka juga berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Awalnya perlu penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya, Masyarakat Kampung Topeng pada awal menempati Kampung Topeng memerlukan adaptasi, ketika masyarakat Kampung Topeng nyaman dengan lingkungan sekitarnya, maka mereka pasti lebih antusias untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

Syarat kedua yakni *Goal-attainment*, sistem yang ada harus terdapat rumusan agar dapat menggapai tujuan dalam sistem tersebut. Pada kedua ini, pihak Dinas Sosial P2AP3KB Kota Malang telah memberdayakan gelandangan dan pengemis yang ada di Kampung Topeng, seperti pelatihan pembuatan peyek, pelatihan pembuatan topeng, pelatihan membuat bakso, pelatihan membuat sabun yang ditaruh dalam sepiteng, membuat kotak untuk tempat penyimpanan barang-barang dan perkakas. Pemberdayaan berupa pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan agar masyarakat di Kampung Topeng dapat memperoleh penghasilan dan tidak turun ke jalan lagi untuk mencari uang. Kegiatan pelatihan berupa pemberdayaan tersebut awalnya dilakukan di Kampung Topeng pada tahun 2016, sasaran utamanya untuk pengunjung wisata Kampung Topeng, akan tetapi pada tahun 2018 sudah ada masyarakat di Kampung Topeng yang mulai turun ke jalan lagi dikarenakan penghasilan yang tidak menentu dari mengandalkan hasil jualan di Kampung Topeng.

Syarat ketiga yakni *Integration*, sistem yang di dalamnya terdapat komponen, harus dapat diatur hubungan antara komponen tersebut. Penduduk Kampung Topeng pada awalnya sangat berjarak, ada penjual sayur yang bernama Ibu Anas yang menjual sayur-mayur di depan rumahnya, terdapat tetangga yang berhutang dan enggan untuk membayar ketika membeli sayur di Ibu Anas. Di samping itu, kegiatan masyarakat di kampung Topeng, diantaranya pengajian rutin yang diselenggarakan setiap Kamis malam, hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan antara satu dengan yang lain. Hal ini yang disampaikan oleh salah satu masyarakat Kampung Topeng, Pak Kamto Sutrisno.

Syarat keempat yakni *Latency*, yakni sistem yang ada hendaknya memelihara, melengkapi serta memperbaiki motivasi yang ada pada setiap individu maupun pola kultural yang ada di masyarakat. Syarat keempat ini tidak dapat terlaksanakan dengan baik, dikarenakan saat ini masyarakat dari Kampung Topeng dominan sudah kembali turun ke jalan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup ini bukan hanya pada individu, melainkan keluarga mereka.

KESIMPULAN

Pemberdayaan di Kampung Topeng, Kota Malang dapat dilihat sebagai involusi atau ketidakberlanjutan seperti yang ditunjukkan dari tidak berjalannya program-program

yang sebelumnya dilaksanakan. Faktor-faktor penyebab involusi baik ditemukan dari pelaksana program dan masyarakat yang menjadi sasaran. Dari sisi pelaksana program terkait erat dengan perubahan skala prioritas program dinas, pergantian kepala dinas, keterbatasan sumber daya, kemerosotan kolaborasi persoalan lokasi yang jauh dari pusat kota. Sedangkan dari sisi masyarakat kebudayaan kemiskinan dan kualitas tidak terstandar.

Keterbatasan penelitian ini belum sampai kepada strategi menghidupkan kampung pemberdayaan dan belum meneliti sampai intervensi birokrasi pemerintah untuk itu bagi peneliti selanjutnya harus membahas hal-hal tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang serta Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Muhammadiyah Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsaad, R. I., Hamdan, A., Binsaddig, R., & Kanan, M. A. (2023). Empowerment Sustainability Perspectives For Bahraini Women As Entrepreneurs. *International Journal Of Innovation Studies*, 7(4), 245–262. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2023.04.003>
- Amalta, G., Apriansya, M. T. Y. &, Maryani, M. (2023). Capacity Building Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif Pada Lahan Gambut di Kecamatan Bukit Batu, Provinsi Riau. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Pekamas)*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.46961/jpk.v2i2.638>
- Atmojo, M., & Darumurti, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tanaman Obat Keluarga (Toga). *Jurnal Abdimas Bsi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 100–109. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v4i1.8660>
- Cahyono, B. P., Sohirin, S., & Al-Asfahani, N. Z. (2023). Implementasi Digitalisasi Koperasi Sebagai Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 3(1), 1–8.
- Djam'an, S., & Komariah, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Berbasis Komunitas: Review Literatur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta Stia Mataram*, 7(1), 132–146.
- Galie, A., & Farnworth, C. R. (2019). Power Through: A New Concept In The Empowerment Discourse. *Global Food Security*, 21, 13–17. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.07.001>
- Geertz, C. (2016). *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi Di Indonesia (Cet-1)*. Komunitas Bambu.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, And Creative Economy*, 1(2).
- Ikbar, Y. (2014). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif (Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah)*. PT Refika Aditama.
- Kaltsum, U., Hasan, A., & Binarni, I. (2023). Analysis The Economy Empowerment Based On Ecoprotection In Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 6 Poso.

- Devotion Journal Of Community Service*, 4(4), 987–996.
<https://doi.org/10.36418/devotion.v4i4.457>
- Koeswinarno. (2015). Memahami Etnografi Ala Spradley. *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 1(2).
- Lawson, L., & Kearns, A. (2014). Rethinking The Purpose Of Community Empowerment In Neighbourhood Regeneration: The Need For Policy Clarity. *Local Economy*, 29 (1–2), 65–81. <https://doi.org/10.1177/0269094213519307>
- Lee, T. H., & Jan, F.-H. (2019). Can Community-Based Tourism Contribute To Sustainable Development? Evidence From Residents' Perceptions Of The Sustainability. *Tourism Management*, 70, 368–380.
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.003>
- Muhtalim. (2020). *Involusi Pertanian Pedesaan (Studi Penyebab Dan Dampak Involusi Pertanian Di Desa Jembangan, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen)*. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Perguna, L. A., Imamul Huda Al Siddiq, & Irawan. (2019). Desa Membangun UMKM: Pendampingan UMKM berbasis Village-Driven Development dalam Penguatan Ekonomi Warga Di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 217-229.
<https://doi.org/10.52166/engagement.v3i2.62>
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61.
- Raj, G., Feola, G., Hajer, M., & Runhaar, H. (2022). Power And Empowerment Of Grassroots Innovations For Sustainability Transitions: A Review. *Environmental Innovation And Societal Transitions*, 43, 375–392.
<https://doi.org/10.1016/j.eist.2022.04.009>
- Saleh, A., & Sihite, M. (2020). Strategi Komunikasi Untuk Program Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 98–105. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v4i1.4134>
- Scheyvens, R. (2020). Empowerment. *International Encyclopedia Of Human Geography*, 4. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10817-0>
- Sidiq, U., Choiri, M. & Mujahidin, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9).
- Soetomo. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Pustaka Pelajar.
- Sofia, A. (2021). Konsep Awal Pemberdayaan Masyarakat Oleh Aisyiyah Kajian Media Terhadap Suara 'Aisyiyah Edisi Pra-Kemerdekaan. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(1), 45–58. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i1.2492>
- Sugarda, Y. B. (2020). *Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Group Discussion Sebagai Metode Riset Kualitatif*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Suminartini, S., & Susilawati, S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(3), 226–237.
<https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i3.3340>
- Susilo, R. K. D. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Ekologis Kultural Untuk

- Penyelamatan Mata Air Di Kota Batu. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 28–38.
- Sutaryono. (2019). *Pemberdayaan Setengah Hati: Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*. Among Karta.
- Turama, A. R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *Eufoni: Journal Of Language, Literary And Cultural Studies*, 2, 58–69.
- Wijaya, M., & Syafhendry. (2023). Persetujuan Bangunan Gedung; Inovasi Kebijakan Atau Involusi Kebijakan? *Public Policy; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 4(1), 176–192.
- Yusnandar, W., Deliaty, D., & Jufrizen, J. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Keterampilan Wirausahaan Olahan Tahun Didesa Kotangan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 39–51.

Article submitted 29 Oct 2023. Resubmitted 24 Dec 2023. Final acceptance 31 Dec 2023. Final version published as submitted by the author JSPH – Vol. 8, No. 2, 2023